

ABSTRAK

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Mengingat begitu besarnya peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka selayaknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) melengkapi dirinya dengan prosedur pemeriksaan yang baik, serta kesadaran warga negara untuk membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Peranan Verifikasi / Pemeriksaan Atas Objek Pajak Di Lapangan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dianalisis menggunakan Uji Dua Sampel Berpasangan (*Paired Sample T-test*).

Untuk keperluan analisis dan penelitian, diperoleh data perbandingan Pajak Bumi dan Bangunan terutang sebelum dan sesudah verifikasi lapangan tahun 2004 – 2005. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 48 orang wajib pajak mengalami kenaikan dan mengakibatkan penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan meningkat. Secara total peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan ini sebesar 20,46%.

Hipotesis yang diambil adalah “Terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan”. Hipotesis diuji dengan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian di KP-PBB yang kemudian diolah dan diuji dengan Paired Sample T-test. *Asymp. Sig (Asymptotic Significance)* yang diperoleh adalah 0,027 atau probabilitas di bawah 0,05 ($0,027 < 0,05$).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Dimana pemeriksaan pajak di lapangan mempunyai peranan yang besar dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4
1.5 Kerangka Pemikiran	5
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Peran Pajak Dalam Pembangunan.....	9
2.1.2 Definisi Pajak	9
2.1.3 Fungsi Pajak	10
2.1.4 Teori Pemungutan Pajak dan Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2.1.4.1 Teori Pemungutan Pajak	11
2.1.4.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	13
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.8 Pengelompokkan Pajak	18
2.1.9 Tarif Pajak	19
2.2 Pemeriksaan (<i>Auditing</i>)	21
2.3. Pajak Bumi dan Bangunan	22

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	23
2.3.2 Dasar Hukum.....	25
2.3.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	26
2.3.4 Subjek Pajak.....	29
2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Terhutang	31
2.3.6 Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang.....	33
2.3.7 Tahun Pajak, Saat, dan Tempat yang Menentukan Pajak Terhutang	35
2.3.7.1 Tahun Pajak.....	35
2.3.7.2 Saat Pajak Terhutang.....	35
2.3.7.3 Tempat Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang	35
2.3.8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (SKP).....	36
2.3.8.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)	36
2.3.8.2 Surat Ketetapan Pajak (SKP)	36
2.3.8.3 Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan	38
2.3.9 Surat Tagihan Pajak (STP)	40
2.3.10 Penetapan Pembayaran.....	41

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN..... 45

3.1 Objek Penelitian	45
3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga.....	45
3.1.2 Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ..	48
3.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	49
3.2 Metode Penelitian.....	53
3.2.1 Metode yang Digunakan	53
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	53
3.2.3 Metode Analisis.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 56

4.1 Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan serta Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Melalui Tempat Pembayaran PBB	56
4.1.1 Pendaftaran.....	56
4.1.2 Pendataan	59
4.1.3 Penilaian	61

4.1.4 Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB Sektor Perkotaan dan Pedesaan Melalui Tempat Pembayaran PBB	62
4.1.4.1 Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB Sektor Perkotaan.....	63
4.1.4.2 Tata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, dan Pelimpahan Hasil Penerimaan PBB Sektor Pedesaan.....	67
4.1.5 Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga.....	74
4.1.6 Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.	78
4.2 Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga, Data Hasil Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan serta Analisis Data dengan Menggunakan SPSS	80
4.2.1 Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga.....	80
4.2.2 Data Hasil Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan.....	88
4.2.3 Analisis Data	94

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 100

5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB	
	Tahun 2003 – 2005.....	75
Tabel 4.2	Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	
	Tahun 2003 -2005	79
Tabel 4.3	Perbandingan PBB Terutang Sebelum dan Sesudah	
	Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan Tahun 2004 – 2005	90
Tabel 4.4	Perbandingan PBB Terutang Sebelum dan Sesudah	
	Pemeriksaan / Verifikasi Lapangan Tahun 2004 – 2005	96
Tabel 4.5	Hasil Olahan SPSS.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi	
	dan Bangunan Bandung Tiga	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran IA Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998.
2. Lampiran IB Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998.
3. Lampiran IIA Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998.
4. Lampiran IIB Keputusan Menteri Keuangan No.523/KMK.04/1998.
5. Collection Rate Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bandung Tiga, tahun 2003 – 2005.
6. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
9. Surat Pernyataan Originalitas